PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja | Hari: Jumat | Tanggal: 23 Juli 2021 | Halaman: 5

KAWASAN MALIOBORO

Pebisnis Lesehan Minta Kelonggaran

JOGJA–Paguyuban Kawasan Malioboro mengharapkan pedagang lesehan diberi toleransi agar bisa buka lapak lebih lama.

Heriambang Jati Kusumo & Ujang Hasanudin
redaksi@harianjogja.com

- **Salah satu kondisi yang penting untuk dipertimbangkan adalah toleransi tutup lebih lama.**
- **Kemarin, sejumlah orang dari Forum Warga Yogyakarta mendatangi Kantor Gubernur DIY.**

"Salah satu kondisi khas yang penting untuk dipertimbangkan adalah memberi toleransi lebih panjang kepada pedagang lesehan untuk tutup lebih lama sampai pukul 23.00 WIB. Mereka [lesehan] fektif mulai berdagang paling cepat pukul 18.30 WIB," ucap Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro, Sujarwo Putra, Kamis (22/7).

Meski begitu, Sujarwo juga mengapresiasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan memberi kelonggaran bagi pedagang kaki lima (PKL) untuk kembali berjualan. Begitu pula, komitmen Pemerintah Pusat untuk sedikit meringankan beban PKL dengan bantuan tunai langsung.

Paguyuban Kawasan Malioboro juga meminta Pemda DIY melalui Dana Keistimewaan maupun APBD dan kepada Pemerintah Kota Jogja melalui APBD agar memberikan stimulan dana hibah untuk modal bergulir kepada PKL di Kawasan Malioboro melalui koperasi dan paguyuban yang memayungi PKL.

Kemarin, sejumlah orang dari Forum Warga Yogyakarta mendatangi Kantor Gubernur DIY. Mereka menuntut Pemda DIY memberikan jatah hidup (jadup) tunai untuk para pelaku usaha kecil dan pekerja informal yang menggantungkan hidupnya dari pendapatan harian selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat atau PPKM Level 4.

Forum Warga Yogyakarta ini terdiri dari Kelompok Pengusaha Kecil Selokan Mataram (KPKSM), Aliansi PKL UGM, Perkumpulan Pedagang Sunday Morning UGM (PPSM UGM), Paguyuban Pedagang Selokan Mataram Klebengan (PPSMK), Pedagang Kaki Lima Depan Panti Rapih (PKL DPR), Asosiasi Warung Kopi Yogyakarta, Komunitas Pasar Kuncen (KPK), PPKLY Unit 10 Trikora, Paguyuban Pramuwisata Taman Sari Yogyakarta (PPTSY), Paguyuban Alun-Alun Utara Yogyakarta, Komite Kampus Yogyakarta, Front Perjuangan Pemuda Indonesia Yogyakarta.

Mereka ditemui oleh Asisten Bidang Pemerintahan Setda DIY, Sumadi, dan Kepala Dinas Sosial, Endang Patmintarsih, perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan sejumlah pejabat dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) DIY.

Juru Bicara Forum Warga Yogyakarta, Dinta Yulian, mengatakan perpanjangan PPKM Darurat menjadi kabar buruk bagi pelaku usaha kecil dan pekerja informal yang menggantungkan pendapatannya dari kegiatan usaha harian. Satu sisi kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah adalah salah satu upaya membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, namun di sisi lain kebutuhan ekonomi terus mendesak.

"Pelaku usaha kecil dan pekerja informal akan sangat mendukung PPKM Darurat bilamana pemerintah juga menunaikan tanggung jawabnya kepada rakyat dalam hal ini penjaminan kebutuhan hidup rakyat. Pengalokasian anggaran untuk jatah hidup tunai bagi rakyat merupakan kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah," kata Dinta.

Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan bantuan sosial untuk warga yang terdampak PPKM Darurat masih dalam pembahasan. Pihaknya sedang berusaha menggeser anggaran rutin menjadi anggaran penanganan Covid-19 termasuk di dalamnya untuk bantuan sosial.

1. .....
2. .....
3. .....

☐ Positif ☐ Segera ☐ Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005